



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 301, 2018

BNP2TKI. Kelas Jabatan dan Peta Jabatan.  
Perubahan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2017  
TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN  
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor B/320/M.SM.04.00/2017 tanggal 28 November  
2017 tentang Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi  
Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan  
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, perlu melakukan  
perubahan atas Lampiran Peraturan Kepala Badan  
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja  
Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan  
dan Peta Jabatan di Lingkungan Badan Nasional  
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

Pasal I

Lampiran I sampai dengan Lampiran X Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 260) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2018

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BADAN NASIONAL  
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 01 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
 DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
 INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2017  
 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA  
 JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN  
 NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
 INDONESIA.

**NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN STRUKTURAL DI  
 LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
 KERJA INDONESIA**

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kelas Jabatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kepala Badan	NG
2.	Sekretaris Utama	16
3.	Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama	15
4.	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	12
5.	Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran I	9
6.	Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran II	9
7.	Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran III	9
8.	Kepala Bagian Administrasi Kerjasama	12
9.	Kasubbag Administrasi Kerjasama Dalam Negeri	9
10.	Kasubbag Administrasi Kerjasama Luar Negeri	9
11.	Kasubbag Tata Usaha Biro	9
12.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	12
13.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan I	9
14.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan II	9
15.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan III	9
16.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	15
17.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	12

18.	Kasubbag Kelembagaan	9
19.	Kasubbag Tata Laksana	9
20.	Kasubbag Analisis Jabatan dan Beban Kerja	9
21.	Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	12
22.	Kasubbag Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	9
23.	Kasubbag Perencanaan Kebutuhan dan Karir Pegawai	9
24.	Kasubbag Peningkatan Kapasitas Pegawai dan Administrasi Jafung	9
25.	Kepala Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian	12
26.	Kasubbag Mutasi dan Informasi Kepegawaian I	9
27.	Kasubbag Mutasi dan Informasi Kepegawaian II	9
28.	Kasubbag Tata Usaha Biro	9
29.	Kepala Biro Keuangan dan Umum	15
30.	Kepala Bagian Pelaksana Anggaran	12
31.	Kasubbag Pelaksana Anggaran I	9
32.	Kasubbag Pelaksana Anggaran II	9
33.	Kepala Bagian Akutansi Pelaporan dan Perbendaharaan	12
34.	Kasubbag Akutansi, Pelaporan dan Perbendaharaan I	9
35.	Kasubbag Akutansi, Pelaporan dan Perbendaharaan II	9
36.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	12
37.	Kasubbag Protokol	9
38.	Kasubbag Tata Usaha Biro	9
39.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan I	9
40.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan II	9
41.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan III	9
42.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan IV	9
43.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan V	9
44.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	12
45.	Kasubbag Rumah Tangga	9
46.	Kasubbag Perlengkapan	9
47.	Kepala Biro Hukum dan Humas	15
48.	Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan	12
49.	Kasubbag Perancangan Peraturan Perundang-undangan	9
50.	Kasubbag Perancangan Naskah Kerjasama	9
51.	Kasubbag Tata Usaha Biro	9
52.	Kepala Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum	12
53.	Kasubbag Penyuluhan dan Konsultasi Hukum	9
54.	Kasubbag Bantuan Hukum	9

55.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum	9
56.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	12
57.	Kasubbag Kerja Sama Antar Lembaga	9
58.	Kasubbag Pendapat Umum dan Pemberitaan	9
59.	Kasubbag Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan	9
60.	Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi	16
61.	Direktur Kerjasama Luar Negeri	15
62.	Kasubdit Kerja Sama Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	12
63.	Kasi Penyiapan Naskah Kerja Sama	9
64.	Kasi Evaluasi Kerja Sama	9
65.	Kasubdit Kerja Sama Kawasan Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional	12
66.	Kasi Penyiapan Naskah Kerja Sama	9
67.	Kasi Evaluasi Kerja Sama	9
68.	Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri Kawasan Timur Tengah	12
69.	Kasi Penyiapan Naskah Kerja Sama	9
70.	Kasi Evaluasi Kerja Sama	9
71.	Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN I	15
72.	Kasubdit Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12
73.	Kasi Pemetaan Potensi Penawaran	9
74.	Kasi Pemetaan Potensi Permintaan	9
75.	Kasubdit Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri	12
76.	Kasi Analisis Penawaran dan Permintaan	9
77.	Kasi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan	9
78.	Kasubdit Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12
79.	Kasi Harmonisasi Pelatihan	9
80.	Kasi Harmonisasi Uji Kompetensi	9
81.	Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN II	15
82.	Kasubdit Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12
83.	Kasi Pemetaan Potensi Penawaran	9
84.	Kasi Pemetaan Potensi Permintaan	9
85.	Kasubdit Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri	12
86.	Kasi Analisis Penawaran dan Permintaan	9
87.	Kasi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan	9
88.	Kasubdit Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12
89.	Kasi Harmonisasi Pelatihan	9
90.	Kasi Harmonisasi Uji Kompetensi	9



91.	Direktur Promosi	15
92.	Kasubdit Promosi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	12
93.	Kasi Kawasan Asia Pasifik	9
94.	Kasi Kawasan Amerika	9
95.	Kasubdit Promosi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa	12
96.	Kasi Kawasan Timur Tengah	9
97.	Kasi Kawasan Afrika dan Eropa	9
98.	Kasubdit Monitoring dan Evaluasi	12
99.	Kasi Monitoring	9
100.	Kasi Evaluasi	9
101.	Deputi Bidang Penempatan	16
102.	Direktur Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen	15
103.	Kasubdit Dokumen Visa Kerja dan Keimigrasian	12
104.	Kasi Dokumen Visa Kerja	9
105.	Kasi Dokumen Keimigrasian	9
106.	Kasubdit Dokumen Kesehatan, Psikologi dan Administrasi Kependudukan	12
107.	Kasi Dokumen Kesehatan dan Psikologi	9
108.	Kasi Dokumen Administrasi Kependudukan	9
109.	Kasubdit Dokumen Sertifikasi Kompetensi dan Dokumen Penempatan Lainnya	12
110.	Kasi Dokumen Sertifikasi Kompetensi dan Dok	9
111.	Kasi Dokumen Penempatan Lainnya	9
112.	Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan	15
113.	Kasubdit Sosialisasi	12
114.	Kasi Penyiapan Bahan dan Disain Sosialisasi	9
115.	Kasi Pelaksanaan Sosialisasi	9
116.	Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi	12
117.	Kasi Monitoring Sosialisasi	9
118.	Kasi Evaluasi Sosialisasi	9
119.	Kasubdit Kelembagaan Penempatan	12
120.	Kasi Kelembagaan Penempatan	9
121.	Kasi Kelembagaan Pendukung Penempatan	9
122.	Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan	15
123.	Kasubdit Penyiapan Pemberangkatan	12
124.	Kasi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	9
125.	Kasi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa	9
126.	Kasubdit Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan Fasilitasi Pembiayaan	12
127.	Kasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan	9
128.	Kasi Fasilitasi Pembiayaan	9

129.	Kasubdit Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri	12
130.	Kasi Fasilitasi Perangkat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri	9
131.	Kasi Monitoring Pelaksanaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri	9
132.	Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah	15
133.	Kasubdit Penyiapan Penempatan	12
134.	Kasi Penempatan Antar Pemerintah	9
135.	Kasi Penempatan Pemerintah dan Badan Hukum	9
136.	Kasubdit Kerjasama Antar Instansi	12
137.	Kasi Kerjasama Sektoral	9
138.	Kasi Kerjasama Daerah	9
139.	Kasubdit Pelaksanaan Penempatan	12
140.	Kasi Pendataan	9
141.	Kasi Pemberangkatan	9
142.	Deputi Bidang Perlindungan	16
143.	Direktur Pelayanan Pengaduan	15
144.	Kasubdit Pendaftaran dan Informasi Pengaduan	12
145.	Kasi Pendaftaran dan Informasi Pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	9
146.	Kasi Pendaftaran dan Informasi Pengaduan Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa	9
147.	Kasubdit Analisis Pengaduan	12
148.	Kasi Analisis Pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	9
149.	Kasi Analisis Pengaduan Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa	9
150.	Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Pengaduan	12
151.	Kasi Monitoring	9
152.	Kasi Evaluasi	9
153.	Direktur Mediasi dan Advokasi	15
154.	Kasubdit Mediasi dan Advokasi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	12
155.	Kasi Standarisasi Sarana dan Kerjasama Lembaga Perlindungan	9
156.	Kasi Litigasi dan Non Litigasi	9
157.	Kasubdit Mediasi dan Advokasi Kawasan Timur Tengah	12
158.	Kasi Standarisasi Sarana dan Kerjasama Lembaga Perlindungan	9
159.	Kasi Litigasi dan Non Litigasi	9
160.	Kasubdit Mediasi dan Advokasi Kawasan Afrika dan	12

	Eropa	
161.	Kasi Standarisasi Sarana dan Kerjasama Lembaga Perlindungan	9
162.	Kasi Litigasi dan Non Litigasi	9
163.	Direktur Pemberdayaan	15
164.	Kasubdit Kerja Sama Antar Lembaga	12
165.	Kasi Kerja Sama Lembaga Keuangan dan Remitansi	9
166.	Kasi Kerja Sama Lembaga Non Keuangan	9
167.	Kasubdit Pelayanan Kepulangan	12
168.	Kasi Pendataan	9
169.	Kasi Kerjasama Debarkasi	9
170.	Kasubdit Fasilitasi dan Rehabilitasi TKI Purna	12
171.	Kasi Fasilitasi	9
172.	Kasi Rehabilitasi	9
173.	Direktur Pengamanan dan Pengawasan	15
174.	Kasubdit Pengamanan	12
175.	Kasi Pengamanan Keberangkatan	9
176.	Kasi Pengamanan Kepulangan	9
177.	Kasubdit Pengawasan	12
178.	Kasi Pengawasan Keberangkatan	9
179.	Kasi Pengawasan Kepulangan	9
180.	Kasubdit Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	12
181.	Kasi Penyidikan	9
182.	Kasi Penindakan	9
183.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi	15
184.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	12
185.	Kepala Sub Bidang Litbang Kerjasama dan Promosi	9
186.	Kepala Sub Bidang Penempatan dan Perlindungan	9
187.	Kepala Bidang Sistem Informasi	12
188.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi	9
189.	Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Sistem Informasi	9
190.	Kepala Bidang Pengolahan dan Penyajian Data	12
191.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data	9
192.	Kepala Sub Bidang Penyajian Data	9
193.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Litbang dan Informasi	9
194.	Inspektur	15
195.	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	9
196.	Kepala BP3TKI	13
197.	Kasubbag Tata Usaha BP3TKI	9
198.	Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan BP3TKI	9
199.	Kasi Penyiapan Penempatan BP3TKI	9
200.	Kasi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program	9

	BP3TKI	
201.	Kepala LP3TKI	10
202.	Kepala Urusan Tata Usaha LP3TKI	8

**NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DI  
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA  
KERJA INDONESIA**

<b>No</b>	<b>Nama Jabatan Fungsional</b>	<b>Kelas Jabatan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	11
2.	Arsiparis Ahli Madya	11
3.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	11
4.	Auditor Kepegawaian Ahli Madya	11
5.	Auditor Ahli Madya	11
6.	Peneliti Ahli Madya	11
7.	Pengantar Kerja Ahli Madya	11
8.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	11
9.	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Madya	11
10.	Perencana Ahli Madya	11
11.	Pranata Humas Ahli Madya	11
12.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
13.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	9
14.	Arsiparis Ahli Muda	9
15.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	9
16.	Auditor Kepegawaian Ahli Muda	9
17.	Auditor Ahli Muda	9
18.	Peneliti Ahli Muda	9
19.	Pengantar Kerja Ahli Muda	9
20.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9
21.	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli	9

	Muda	
22.	Perencana Ahli Muda	9
23.	Pranata Humas Ahli Muda	9
24.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
25.	Analisis Kepegawaian Penyelia	8
26.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	8
27.	Arsiparis Ahli Pertama	8
28.	Arsiparis Penyelia	8
29.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
30.	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	8
31.	Auditor Ahli Pertama	8
32.	Peneliti Ahli Pertama	8
33.	Pengantar Kerja Ahli Pertama	8
34.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
35.	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Pertama	8
36.	Perencana Ahli Pertama	8
37.	Pranata Humas Ahli Pertama	8
38.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
39.	Koordinator	8
40.	Pranata Komputer Penyelia	7
41.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7
42.	Analisis Hukum	7
43.	Analisis Jabatan	7
44.	Analisis Kelembagaan	7
45.	Analisis Kepegawaian Mahir	7
46.	Analisis Kerja sama	7
47.	Analisis Ketatalaksanaan	7
48.	Analisis Kinerja	7
49.	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	7
50.	Analisis Pemetaan dan Harmonisasi Kompetensi Tenaga	7

	Kerja Indonesia	
51.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7
52.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM	7
53.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7
54.	Analisis Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	7
55.	Analisis Pengembangan SDM	7
56.	Analisis Perencanaan	7
57.	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	7
58.	Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia	7
59.	Analisis Promosi dan Kerja sama Luar Negeri	7
60.	Analisis Publikasi	7
61.	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	7
62.	Analisis Sistem Informasi	7
63.	Arsiparis Mahir	7
64.	Bendahara	7
65.	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	7
66.	Penelaah Perjanjian dan Informasi Hukum	7
67.	Pengelola Kelembagaan dan Pemasarakatan Program TKI	7
68.	Pengelola Penempatan TKI	7
69.	Pengelola Perlindungan dan Pemberdayaan TKI	7
70.	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7
71.	Penyusun Laporan Keuangan	7
72.	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	7
73.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
74.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7
75.	Penyusun Rencana Keuangan	7
76.	Penyusun Rencana Mutasi	7
77.	Pranata Komputer Mahir	7

78.	Analisis Kepegawaian Terampil	6
79.	Arsiparis Terampil	6
80.	Pranata Laporan Keuangan	6
81.	Pengelola Dokumentasi	6
82.	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6
83.	Pengelola Ketatausahaan	6
84.	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6
85.	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6
86.	Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit	6
87.	Pengolah Data	6
88.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	6
89.	Pranata Komputer Terampil	6
90.	Verifikator Keuangan	6
91.	Pengadministrasi Kepegawaian	5
92.	Pengadministrasi Umum	5
93.	Petugas Protokol	5

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA

ttd

NUSRON WAHID

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 01 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA  
 JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

**NILAI JABATAN UNTUK JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA**

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)	Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)			Faktor 3 Wewenang Penyeliaan + Manajerial (1-3)			Faktor 4 Hubungan Personal		Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)	Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)
											Sifat Hub. (1-4)	Tujuan Hub. (1-4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Kepala Badan	NG	4.478											

2.	Sekretaris Utama	16	3.930	4	775	3	350	3	900	3	75	3	100	4	505	5	1.225
3.	Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama	15	3.165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
4.	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
5.	Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran I	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
6.	Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran II	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
7.	Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran III	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
8.	Kepala Bagian Administrasi Kerjasama	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
9.	Kasubbag	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310



	Administrasi Kerjasama Dalam Negeri																
10.	Kasubbag Administrasi Kerjasama Luar Negeri	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
11.	Kasubbag Tata Usaha Biro	9	1.455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
12.	Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
13.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan I	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
14.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan II	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
15.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan III	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
16.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	15	3.165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
17.	Kepala Bagian Organisasi	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575

	Han Tata Laksana																
18.	Kasubbag Kelembagaan	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
19.	Kasubbag Tata Laksana	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
20.	Kasubbag Analisis Jabatan dan Beban Kerja	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
21.	Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
22.	Kasubbag Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
23.	Kasubbag Perencanaan Kebutuhan dan Karir Pegawai	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
24.	Kasubbag Peningkatan Kapasitas	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

	Pegawai dan Administrasi Jafung																
25.	Kepala Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
26.	Kasubbag Mutasi dan Informasi Kepegawaian I	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
27.	Kasubbag Mutasi dan Informasi Kepegawaian II	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
28.	Kasubbag Tata Usaha Biro	9	1.455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
29.	Kepala Biro Keuangan dan Umum	15	3.165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
30.	Kepala Bagian Pelaksana Anggaran	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
31.	Kasubbag Pelaksana Anggaran I	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
32.	Kasubbag	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

	Pelaksana Anggaran II																
33.	Kepala Bagian Akutansi Pelaporan dan Perbendaharaan	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
34.	Kasubbag Akutansi, Pelaporan dan Perbendaharaan I	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
35.	Kasubbag Akutansi, Pelaporan dan Perbendaharaan II	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
36.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	12	2.115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
37.	Kasubbag Protokol	9	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
38.	Kasubbag Tata Usaha Biro	9	1.455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
39.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan I	9	1.455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
40.	Kasubbag Tata Usaha	9	1.455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

	Perbantuan II																
41.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan III	9	1,455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
42.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan IV	9	1,455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
43.	Kasubbag Tata Usaha Perbantuan V	9	1,455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
44.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
45.	Kasubbag Rumah Tangga	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
46.	Kasubbag Perlengkapan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
47.	Kepala Biro Hukum dan Humas	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
48.	Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang- undangan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
49.	Kasubbag	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

	Perancangan Peraturan Perundang- undangan																
50.	Kasubbag Perancangan Naskah Kerjasama	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
51.	Kasubbag Tata Usaha Biro	9	1,455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
52.	Kepala Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
53.	Kasubbag Penyuluhan dan Konsultasi Hukum	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
54.	Kasubbag Bantuan Hukum	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
55.	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
56.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575

57.	Kasubbag Kerja Sama Antar Lembaga	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
58.	Kasubbag Pendapat Umum dan Pemberitaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
59.	Kasubbag Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
60.	Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi	16	3,930	4	775	3	350	3	900	3	75	3	100	4	505	5	1,225
61.	Direktur Kerja Sama Luar Negeri	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
62.	Kasubdit Kerja Sama Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
63.	Kasi Penyiapan Naskah Kerja Sama	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

64.	Kasi Evaluasi Kerja Sama	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
65.	Kasubdit Kerja Sama Kawasan Eropa dan Afrika dan Organisasi Internasional	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
66.	Kasi Penyiapan Naskah Kerja Sama	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
67.	Kasi Evaluasi Kerja Sama	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
68.	Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri Kawasan Timur Tengah	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
69.	Kasi Penyiapan Naskah Kerja Sama	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
70.	Kasi Evaluasi Kerja Sama	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
71.	Direktur Pemetaan dan Harmonisasi	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975

	Kualitas TKLN I																
72.	Kasubdit Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
73.	Kasi Pemetaan Potensi Penawaran	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
74.	Kasi Pemetaan Potensi Permintaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
75.	Kasubdit Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
76.	Kasi Analisis Penawaran dan Permintaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
77.	Kasi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

78.	Kasubdit Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
79.	Kasi Harmonisasi Pelatihan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
80.	Kasi Harmonisasi Uji Kompetensi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
81.	Direktur Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas TKLN II	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
82.	Kasubdit Pemetaan Potensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
83.	Kasi Pemetaan Potensi Penawaran	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
84.	Kasi Pemetaan Potensi Permintaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

85.	Kasubdit Analisis dan Keterpaduan Tenaga Kerja Luar Negeri	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
86.	Kasi Analisis Penawaran dan Permintaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
87.	Kasi Keterpaduan Penawaran dan Permintaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
88.	Kasubdit Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Luar Negeri	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
89.	Kasi Harmonisasi Pelatihan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
90.	Kasi Harmonisasi Uji Kompetensi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
91.	Direktur Promosi	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
92.	Kasubdit Promosi Kawasan Asia	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575

	Pasifik dan Amerika																
93.	Kasi Kawasan Asia Pasifik	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
94.	Kasi Kawasan Amerika	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
95.	Kasubdit Promosi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
96.	Kasi Kawasan Timur Tengah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
97.	Kasi Kawasan Afrika dan Eropa	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
98.	Kasubdit Monitoring dan Evaluasi	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
99.	Kasi Monitoring	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
100.	Kasi Evaluasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
101.	Deputi Bidang Penempatan	16	3,930	4	775	3	350	3	900	3	75	3	100	4	505	5	1,225
102.	Direktur Kerjasama dan Verifikasi	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975

	Penyiapan Dokumen																
103.	Kasubdit Dokumen Visa Kerja dan Keimigrasian	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
104.	Kasi Dokumen Visa Kerja	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
105.	Kasi Dokumen Keimigrasian	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
106.	Kasubdit Dokumen Kesehatan, Psikologi dan Administrasi Kependudukan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
107.	Kasi Dokumen Kesehatan dan Psikologi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
108.	Kasi Dokumen Administrasi Kependudukan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
109.	Kasubdit Dokumen Sertifikasi Kompetensi dan Dokumen Penempatan Lainnya	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575

110.	Kasi Dokumen Sertifikasi Kompetensi dan Dokumen	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
111.	Kasi Dokumen Penempatan Lainnya	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
112.	Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
113.	Kasubdit Sosialisasi	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
114.	Kasi Penyiapan Bahan dan Disain Sosialisasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
115.	Kasi Pelaksanaan Sosialisasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
116.	Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
117.	Kasi Monitoring Sosialisasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

118.	Kasi Evaluasi Sosialisasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
119.	Kasubdit Kelembagaan Penempatan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
120.	Kasi Kelembagaan Penempatan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
121.	Kasi Kelembagaan Pendukung Penempatan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
122.	Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
123.	Kasubdit Penyiapan Pemberangkatan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
124.	Kasi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
125.	Kasi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
126.	Kasubdit Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575

	Fasilitasi Pembiayaan																
127.	Kasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
128.	Kasi Fasilitasi Pembiayaan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
129.	Kasubdit Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
130.	Kasi Fasilitasi Perangkat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
131.	Kasi Monitoring Pelaksanaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
132.	Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
133.	Kasubdit Penyiapan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575



	Penempatan																
134.	Kasi Penempatan Antar Pemerintah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
135.	Kasi Penempatan Pemerintah dan Badan Hukum	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
136.	Kasubdit Kerjasama Antar Instansi	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
137.	Kasi Kerjasama Sektoral	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
138.	Kasi Kerjasama Daerah	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
139.	Kasubdit Pelaksanaan Penempatan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
140.	Kasi Pendataan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
141.	Kasi Pemberangkatan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
142.	Deputi Bidang Perlindungan	16	3,930	4	775	3	350	3	900	3	75	3	100	4	505	5	1,225
143.	Direktur Pelayanan	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975

	Pengaduan																
144.	Kasubdit Pendaftaran dan Informasi Pengaduan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
145.	Kasi Pendaftaran dan Informasi Pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
146.	Kasi Pendaftaran dan Informasi Pengaduan Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
147.	Kasubdit Analisis Pengaduan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
148.	Kasi Analisis Pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
149.	Kasi Analisis Pengaduan Kawasan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

	Timur Tengah, Afrika dan Eropa																
150.	Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Pengaduan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
151.	Kasi Monitoring	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
152.	Kasi Evahuasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
153.	Direktur Mediasi dan Advokasi	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
154.	Kasubdit Mediasi dan Advokasi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
155.	Kasi Standarisasi Sarana dan Kerjasama Lembaga Perlindungan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
156.	Kasi Litigasi dan Non Litigasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
157.	Kasubdit Mediasi dan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575

	Advokasi Kawasan Timur Tengah																
158.	Kasi Standarisasi Sarana dan Kerjasama Lembaga Perlindungan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
159.	Kasi Litigasi dan Non Litigasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
160.	Kasubdit Mediasi dan Advokasi Kawasan Afrika dan Eropa	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
161.	Kasi Standarisasi Sarana dan Kerjasama Lembaga Perlindungan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
162.	Kasi Litigasi dan Non Litigasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
163.	Direktur Pemberdayaan	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
164.	Kasubdit	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575

	Kerja Sama Antar Lembaga																
165.	Kasi Kerja Sama Lembaga Keuangan dan Remitansi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
166.	Kasi Kerja Sama Lembaga Non Keuangan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
167.	Kasubdit Pelayanan Kepulangan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
168.	Kasi Pendataan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
169.	Kasi Kerjasama Debarakasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
170.	Kasubdit Fasilitasi dan Rehabilitasi TKI Purna	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
171.	Kasi Fasilitasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
172.	Kasi Rehabilitasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
173.	Direktur Pengamanan dan	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975

	Pengawasan																
174.	Kasubdit Pengamanan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
175.	Kasi Pengamanan Keberangkatan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
176.	Kasi Pengamanan Kepulangan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
177.	Kasubdit Pengawasan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
178.	Kasi Pengawasan Keberangkatan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
179.	Kasi Pengawasan Kepulangan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
180.	Kasubdit Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
181.	Kasi Penyidikan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
182.	Kasi Penindakan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

183.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi	15	3,165	3	550	2	250	3	900	3	75	2	75	3	340	3	975
184.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
185.	Kepala Sub Bidang Litbang Kerjasama dan Promosi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
186.	Kepala Sub Bidang Penempatan dan Perlindungan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
187.	Kepala Bidang Sistem Informasi	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
188.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
189.	Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Sistem	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

	Informasi																
190.	Kepala Bidang Pengolahan dan Penyajian Data	12	2,115	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	3	340	2	575
191.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
192.	Kepala Sub Bidang Penyajian Data	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
193.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Litbang dan Informasi	9	1,455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
194.	Inspektur	15	3,230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
195.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	9	1,455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
196.	Kepala BP3TKI	13	2,455	1	175	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	2	575
197.	Kasubbag Tata Usaha BP3TKI	9	1,455	1	175	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
198.	Kasi Perlindungan	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

	dan Pemberdayaan BP3TKI																
199.	Kasi Penyiapan Penempatan BP3TKI	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
200.	Kasi Kelembagaan dan Pemasaryakat an Program BP3TKI	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
201.	Kepala LP3TKI	10	1,765	1	175	1	100	1	450	2	50	2	75	3	340	2	575
202.	Kepala Tata Urusan Usaha LP3TKI	8	1,295	1	175	1	100	1	450	1	50	1	30	2	205	1	310

P

KEPALA  
BADAN NASIONALPENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA

ttd

NUSRON WAHID

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 01 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA  
 JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

**NILAI JABATAN UNTUK JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA**

NO.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan (1-9)	Faktor 2 Pengawasan (1-9)	Faktor 3 Pedoman (1-9)	Faktor 4 Kompleksitas (1-9)	Faktor 5 R.Lingkup & Pengaruh (1-6)	Faktor 6 Hub. Pribadi (1-4)	Faktor 7 Tujuan Hubungan (1-4)	Faktor 8 Tuntutan Fisik (1-3)	Faktor 9 Lingk. Kerja (1-3)
1.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	Biro Organisasi dan Kepegawaian	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
2.	Arsiparis Ahli Madya	Biro Hukum dan Humas	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3

3.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	Biro Organisasi dan Kepegawaian	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
4.	Auditor Kepegawaian Ahli Madya	Inspektorat	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	55	3
5.	Auditor Ahli Madya	Inspektorat	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
6.	Peneliti Ahli Madya	Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
7.	Pengantar Kerja Ahli Madya	BP3TKI Bandung/ BP3TKI Serang/ BP3TKI Semarang/ BP3TKI Mataram/Dit. Promosi/ Dit. Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri I/ Dit. Pemetaan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri II/ Dit.	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3

		Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan/ Dit. Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan /Dit. Pelayanan Penempatan Pemerintah/ Dit. Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen/ Dit. Pelayanan Pengaduan/ Dit. Mediasi dan Advokasi/ Dit. Pemberdayaan											
8.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	Biro Keuangan dan Umum	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
9.	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Madya	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
10.	Perencana Ahli Madya	Biro Perencanaan	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3

		dan Administrasi Kerja sama											
11.	Pranata Humas Ahli Madya	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
12.	Pranata Komputer Ahli Madya	Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi	11	1,935	5	750	3	275	4	450	4	255	3
13.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Biro Organisasi dan Kepegawaian	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
14.	Arsiparis Ahli Muda	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
15.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Biro Organisasi dan Kepegawaian	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
16.	Auditor Kepegawaian Ahli Muda	Inspektorat	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
17.	Auditor Ahli Muda	Inspektorat	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
18.	Peneliti Ahli Muda	Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
19.	Pengantar Kerja Ahli Muda	BP3TKI/LP3TKI	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
20.	Pengelola	Biro Keuangan	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3

	Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	dan Umum											
21.	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Muda	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
22.	Perencana Ahli Muda	Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja sama	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
23.	Pranata Humas Ahli Muda	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
24.	Pranata Komputer Ahli Muda	Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi	9	1,505	5	750	3	275	2	125	3	150	3
25.	Analisis Kepegawaian Penyeleksi	Biro Organisasi dan Kepegawaian	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
26.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Biro Organisasi dan Kepegawaian	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
27.	Arsiparis Ahli Pertama	Biro Keuangan dan Umum	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
28.	Arsiparis Penyeleksi	Biro Keuangan dan	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1

		Umum/BP3TKI /LP3TKI											
29.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Biro Organisasi dan Kepegawaian	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
30.	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	Inspektorat	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
31.	Auditor Ahli Pertama	Inspektorat	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
32.	Peneliti Ahli Pertama	Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
33.	Pengantar Kerja Ahli Pertama	BP3TKI/LP3TKI	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
34.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Biro Keuangan dan Umum	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
35.	Perancang Peraturan Perundang - Undangan Ahli Pertama	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1



36.	Perencana Ahli Pertama	Biro Perencanaan dan Administrasi Kerja sama	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
37.	Pranata Humas Ahli Pertama	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
38.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pusat Penelitian, Pengembangan dan Infomasi	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
39.	Koordinator	P4TKI	8	1,140	5	750	2	125	2	125	2	75	1
40.	Pranata Komputer Penyelia	BP3TKI/LP3TKI	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
41.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
42.	Analisis Hukum	Sub Bagian Penyuluhan dan Konsultasi Hukum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
43.	Analisis Jabatan	Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
44.	Analisis	Sub Bagian	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

45.	Analisis Kepegawaian Mahir	Biro Organisasi dan Kepegawaian	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
46.	Analisis Kerja Sama	Sub Bagian Administrasi Kerjasama Dalam Negeri/ Sub Bagian Administrasi Kerja sama Dalam Negeri/ Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri/ Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
47.	Analisis Ketatalaksanaan	Sub Bagian Tata Laksana	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
48.	Analisis Kinerja	Sub Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
49.	Analisis Konsultasi	Sub Bagian	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

	dan Bantuan Hukum	Bantuan Hukum											
50.	Analisis Pemetaan dan Harmonisasi Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia	Seksi Pemetaan Potensi Penawaran/ Seksi Pemetaan Potensi Permintaan/ Seksi Analisis Penawaran dan Permintaan/ Seksi Keterpaduan Penawaran dan permintaan/ Seksi Harmonisasi Pelatihan/ Seksi Harmonisasi Uji Kompetensi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
51.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Sub bagian Peraturan Perundang - Undangan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

52.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM	Sub Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
53.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	Sub Bidang Litbang Penempatan dan Perlindungan TKI/Sub Bidang Litbang Kerja sama dan Promosi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
54.	Analisis Penempatan Tenaga Kerja Indonesia	Seksi Dokumen Visa Kerja/Seksi Dokumen Keimigrasian/ Seksi Dokumen Kesehatan dan Psikologi/ Seksi Dokumen Administrasi Kependudukan /Seksi Dokumen Sertifikasi Kompetensi dan Dokumen/ Seksi Dokumen Penempatan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

		Lainnya/Seksi Penyiapan Bahan dan Disain Sosialisasi/ Seksi Pelaksanaan Sosialisasi/ Seksi Monitoring Sosialisasi/ Seksi Evaluasi Sosialisasi/ Seksi Kelembagaan Penempatan/ Seksi Kelembagaan Pendukung Penempatan/ Seksi Kawasan Asia Pasifik dan Amerika/Seksi Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa/ Seksi Pembekalan Akhir Pemberangkatan /Seksi Fasilitasi Pembiayaan/											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Seksi Fasilitasi Perangkat Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri/ Seksi Monitoring Pelaksanaan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri/Seksi Penempatan Antar Pemerintah/ Seksi Penempatan Pemerintah dan Badan Hukum/ Seksi Kerja sama Sektoral/ Seksi Kerja sama Daerah/ Seksi Pendataan/ Seksi Pemberangkatan											
55.	Analisis Pengembangan SDM	Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

56.	Analisis Perencanaan	Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I/Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran II/Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran III	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
57.	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Karir Pegawai	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
58.	Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia	Seksi Pendaftaran dan Informasi Pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika/Seksi Pendaftaran dan Informasi Pengaduan Kawasan Timur Tengah/Seksi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

		Analisis Pengaduan Kawasan Asia Pasifik dan Amerika /Seksi Analisis Pengaduan Kawasan Timur Tengah, Afrika dan Eropa/ Seksi Monitoring/ Seksi Evaluasi/ Seksi Standardisasi Sarana dan Kerja sama Lembaga Perlindungan/ Seksi Litigasi dan Non Litigasi/ Seksi Standardisasi Sarana dan Kerja sama Lembaga Perlindungan/ Seksi Litigasi dan Non Litigasi/ Seksi Standardisasi Sarana dan											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Kerja sama Lembaga Perlindungan/ Seksi Litigasi dan Non Litigasi/ Seksi Kerja sama Lembaga Keuangan dan Remitansi/ Seksi Kerja sama Lembaga Non Keuangan/ Seksi Pendataan/ Seksi Kerja sama Debarisasi/ Seksi Fasilitasi/ Seksi Rehabilitasi/ Seksi Pengamanan Keberangkatan/ Seksi Pengamanan Kepulangan/ Seksi Pengawasan Keberangkatan/ Seksi Pengawasan Kepulangan/											
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Seksi Penyidikan/ Seksi Penindakan											
59.	Analisis Promosi dan Kerja sama Luar Negeri	Seksi Kawasan Asia Pasifik/ Seksi Kawasan Amerika/ Seksi Kawasan Timur Tengah/ Seksi Kawasan Afrika dan Eropa/ Seksi Monitoring/ Seksi Evaluasi/ Seksi Penyusunan Naskah Kerja sama/ Seksi Evaluasi Kerja sama/ Seksi Penyusunan Naskah Kerja sama/ Seksi Evaluasi Kerja sama/ Seksi Penyusunan Naskah Kerja sama/ Seksi Evaluasi Kerja sama	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

60.	Analisis Publikasi	Sub Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
61.	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	Sub Bagian Perancangan Naskah Kerjasama	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
62.	Analisis Sistem Informasi	Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi/ Sub Bidang Pemeliharaan Sistem Informasi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
63.	Arsiparis Mahir	BP3TKI/LP3TKI /Biro Keuangan dan Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
64.	Bendahara	Sub Bagian Tata Usaha BP3TKI	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
65.	Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Seksi Penyidikan/ Seksi Penindakan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
66.	Penelaah Perjanjian dan	Sub Bagian Dokumentasi	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

	Informasi Hukum	dan Informasi Hukum											
67.	Pengelola Kelembagaan dan Pemasarakatan Program TKI	Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan Program/LP3TKI	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
68.	Pengelola Penempatan TKI	Seksi Penyiapan Penempatan/ LP3TKI /P4TKI	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
69.	Pengelola Perlindungan dan Pemberdayaan TKI	Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan/ LP3TKI /P4TKI	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
70.	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	Sub Bagian Pendapat Umum dan Pemberitaan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
71.	Penyusun Laporan Keuangan	Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan /Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan I/ Sub Bagian Akuntansi,	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

		Pelaporan dan Perbendaharaan II											
72.	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	Sub Bagian Protokol	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
73.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan/ Sub Bagian Tata Usaha Biro/ Sub Bagian Tata Usaha Pusat Litbang dan Informasi/ Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
74.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Sub Bagian Rumah Tangga/Sub Bagian Perlengkapan	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
75.	Penyusun Rencana Keuangan	Sub Bagian Pelaksana Anggaran I/Subbag Pelaksana Anggaran II	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1

76.	Penyusun Rencana Mutasi	Sub Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian I/ Sub Bagian Mutasi dan Informasi Kepegawaian II	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
77.	Pranata Komputer Mahir	BP3TKI/LP3TKI	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1
78.	Analisis Kepegawaian Terampil	Biro Organisasi dan Kepegawaian	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
79.	Arsiparis Terampil	BP3TKI/LP3TKI /Biro Keuangan dan Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
80.	Pranata Laporan Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha Biro/Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat/ Sub Bagian Pusat Penelitian,	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1

		Pengembangan dan Informasi/ Sub Bagian TU Perbantuan I/ Sub Bagian TU Perbantuan II/ Sub Bagian TU Perbantuan III/ Sub Bagian TU Perbantuan IV/ Sub Bagian TU Perbantuan V											
81.	Pengelola Dokumentasi	Sub Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
82.	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
83.	Pengelola Ketatausahaan	P4TKI	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
84.	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Rumah Tangga/ Sub Bagian Perlengkapan	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1

85.	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Sub Bagian Mutasi dan Informasi Pegawai I/Sub Bagian Mutasi dan Informasi Pegawai II	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
86.	Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit	Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
87.	Pengolah Data	Sub Bidang Pengolahan Data/Sub Bidang Penyajian Data/Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
88.	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan I/Sub Bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan II	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
89.	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1



		BP3TKI											
90.	Pranata Komputer Terampil	BP3TKI/LP3TKI	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1
91	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Mutasi dan Informasi Pegawai I/Sub Bagian Mutasi dan Informasi Pegawai II/Subbag Tata Usaha BP3TKI	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1
92	Pengadministrasi Umum	BP3TKI/ LP3TKI/ Sub Bagian Tata Usaha Biro/Sub Bagian Pusat Litbang dan Informasi/Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat/ Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Pegawai dan Administrasi Jabatan Fungsional/Sub Bagian	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1

		Kerjasama Antar Lembaga/Sub Bagian Pendapat Umum dan Pemberitaan											
90.	Petugas Protokol	Sub Bagian Protokol/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan I/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan II/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan III/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan IV	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1

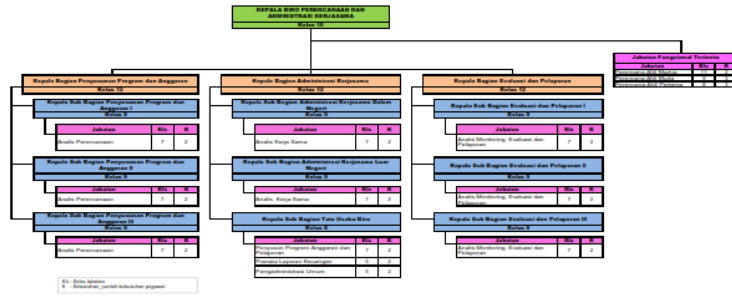
KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
INDONESIA

ttd

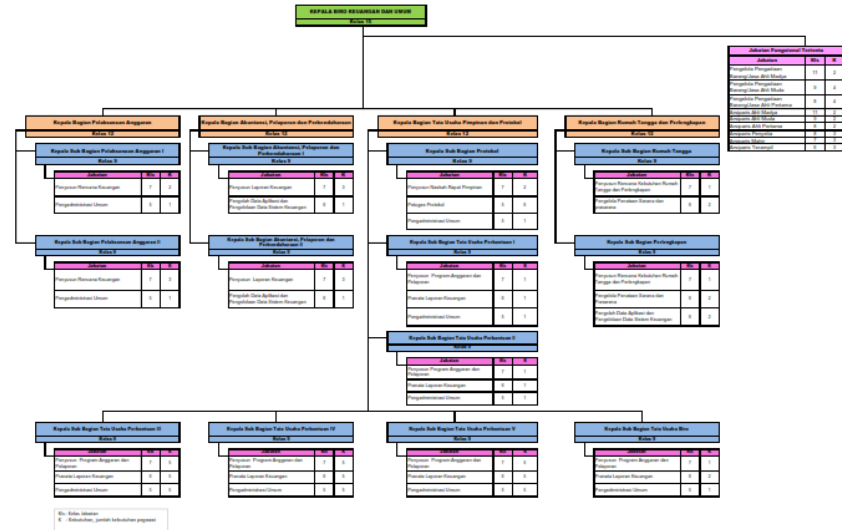
NUSRON WAHID

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 01 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 03  
 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI  
 LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA.

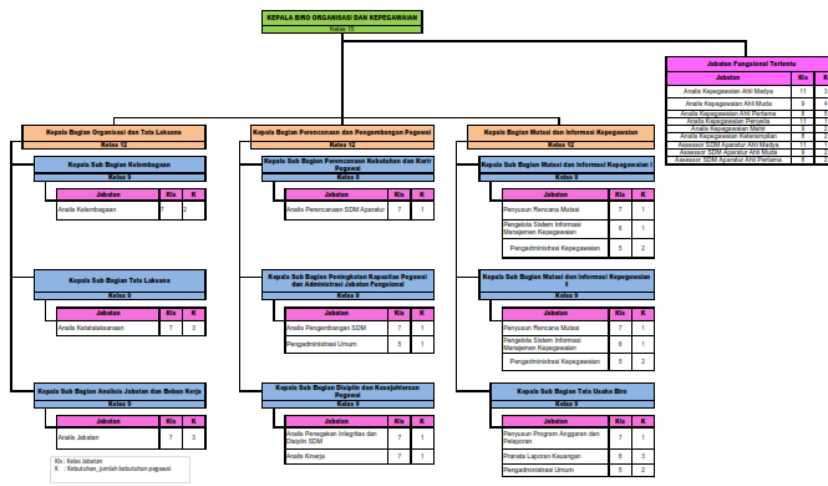
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA  
 BIRO PERENCANAAN DAN ADMINISTRASI KERJA ASAMA



PETA JABATAN BIRO KEUANGAN DAN UMUM



PETA JABATAN BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN



PETA JABATAN BIRO HUKUM DAN HUMAS



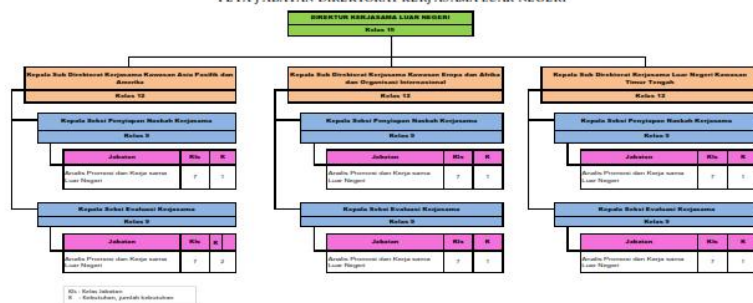
KEPALA  
BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

ttd  
NUSRON WAHID

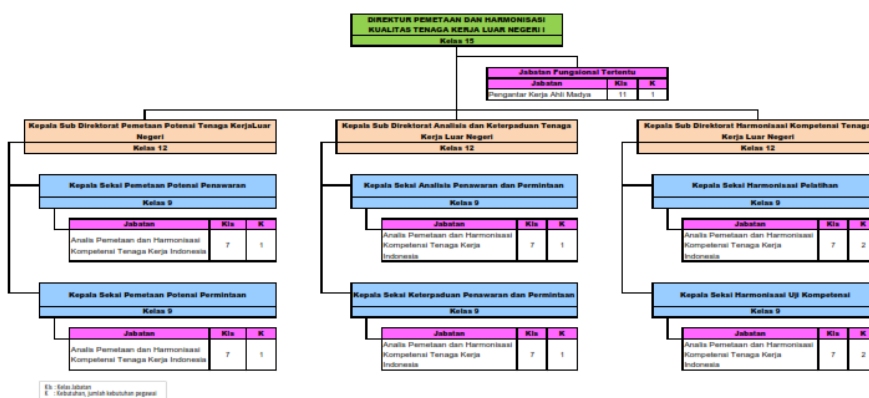
LAMPIRAN V  
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 01 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 03  
 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI  
 LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA.

PETA J ABATAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN KERJ A SAMA LUAR NEGERI DAN PROMOSI

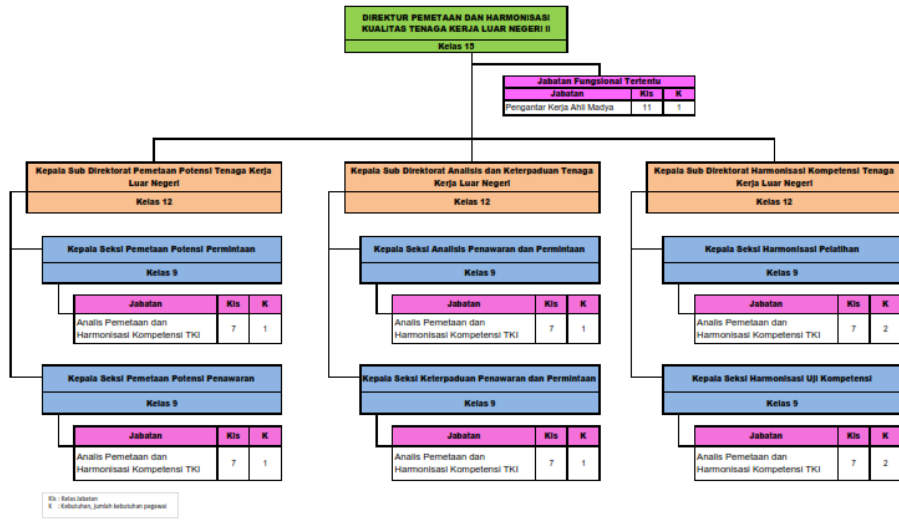
PETA J ABATAN DIREKTORAT KERJ ASAMA LUAR NEGERI



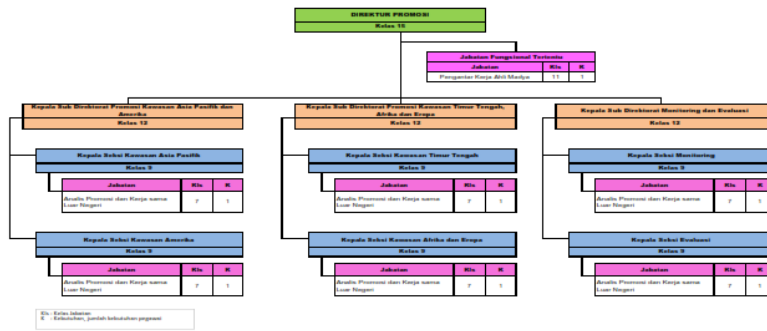
PETA J ABATAN DIREKTORAT PEMETAAN DAN HARMONISASI KUALITAS TENAGA KERJ A LUAR NEGERI I



PETA JABATAN DIREKTORAT PEMETAAN DAN HARMONISASI KUALITAS TENAGA KERJA LUAR NEGERI II



PETA JABATAN DIREKTORAT PROMOSI



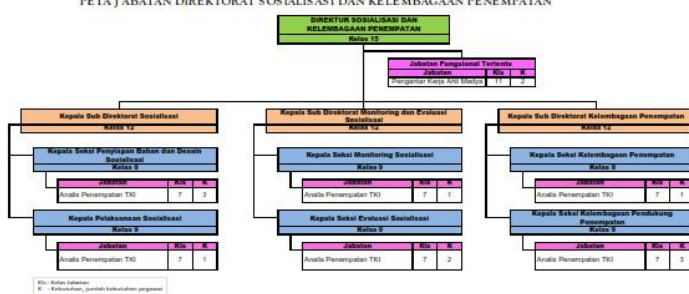
KEPALA  
BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

ttd

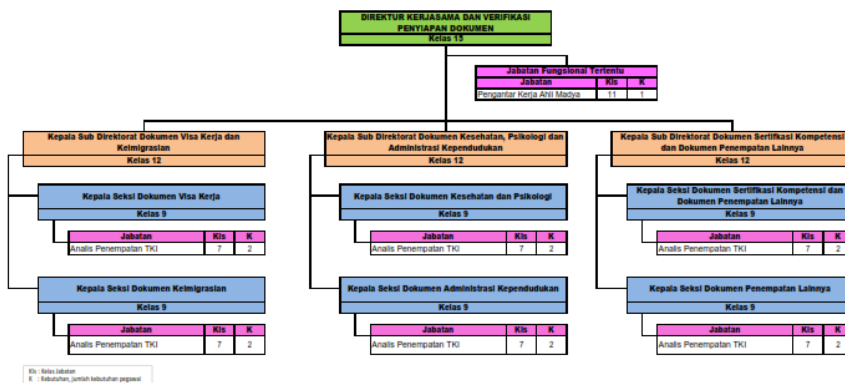
NUSRON WAHID

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 01 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 03  
 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI  
 LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA.

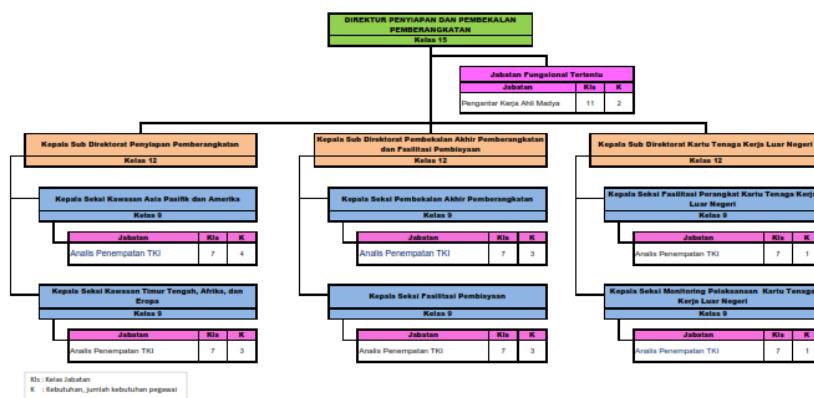
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PENEMPATAN  
 PETA JABATAN DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KELEMBAGAAN PENEMPATAN



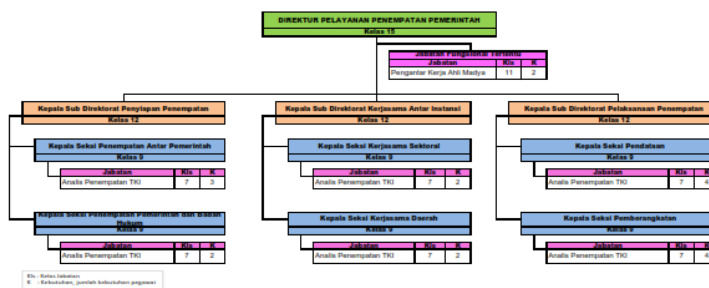
PETA JABATAN DIREKTORAT KERJA SAMA DAN VERIFIKASI PENYIAPAN DOKUMEN



PETA JABATAN DIREKTORAT PENYIAPAN DAN PEMBEKALAN PEMBERANGKATAN



PETA JABATAN DIREKTORAT PELAYANAN PENEMPATAN PEMERINTAH



KEPALA  
BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

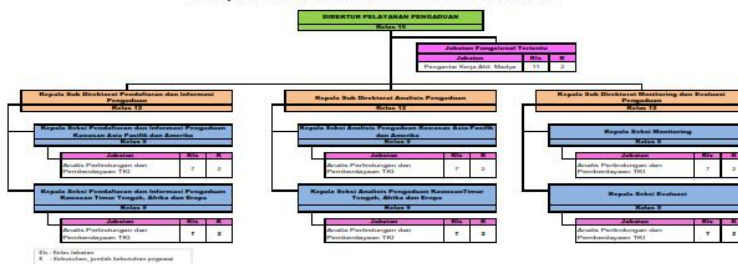
ttd

NUSRON WAHID

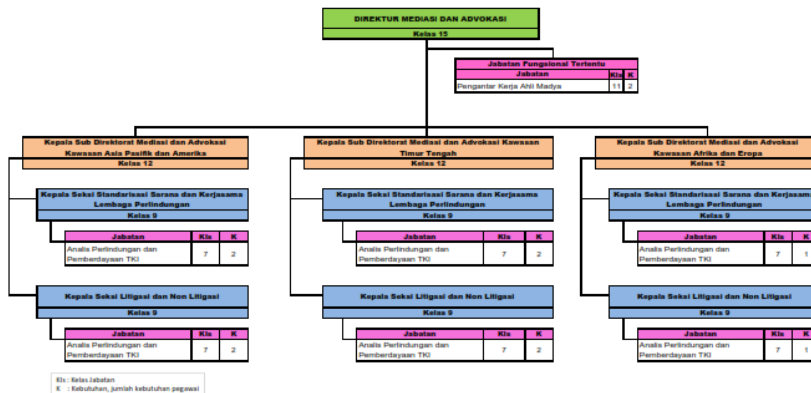


LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 01 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 03  
 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI  
 LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA.

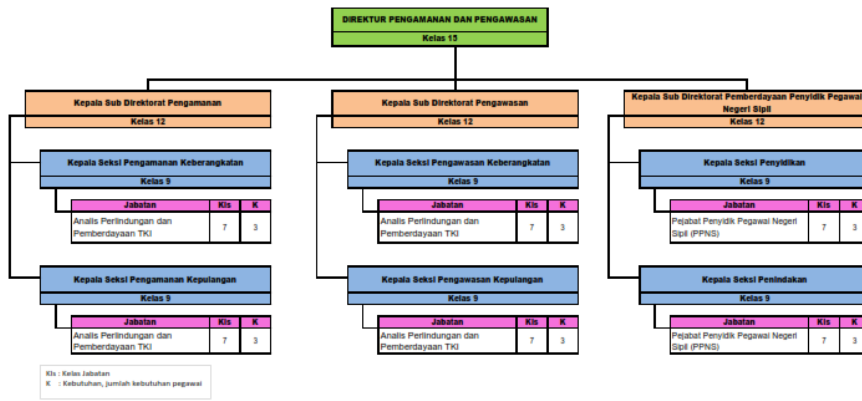
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PERLINDUNGAN  
 PETA JABATAN DIREKTORAT PELAYANAN PENGADUAN



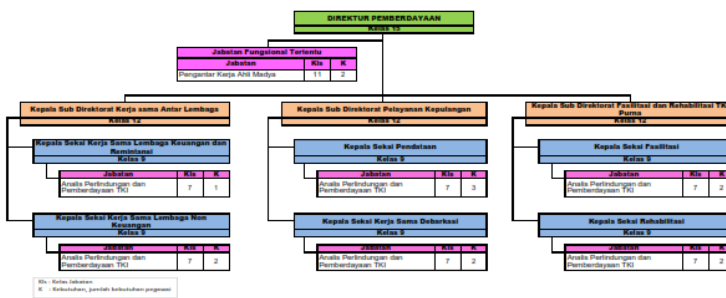
PETA JABATAN DIREKTORAT MEDIASI DAN ADVOKASI



PETA JABATAN DIREKTORAT PENGAMANAN DAN PENGAWASAN



PETA JABATAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN



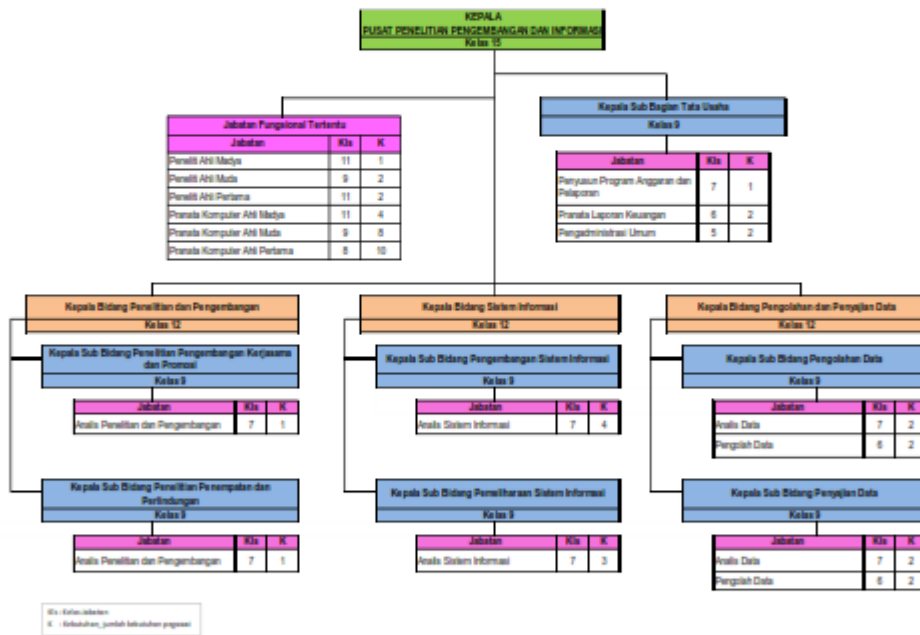
KEPALA  
BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

ttd

NUSRON WAHID

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BADAN NASIONAL  
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 01 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
 DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
 INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2017  
 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA  
 JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN  
 NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
 INDONESIA.

**PETA JABATAN PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI**



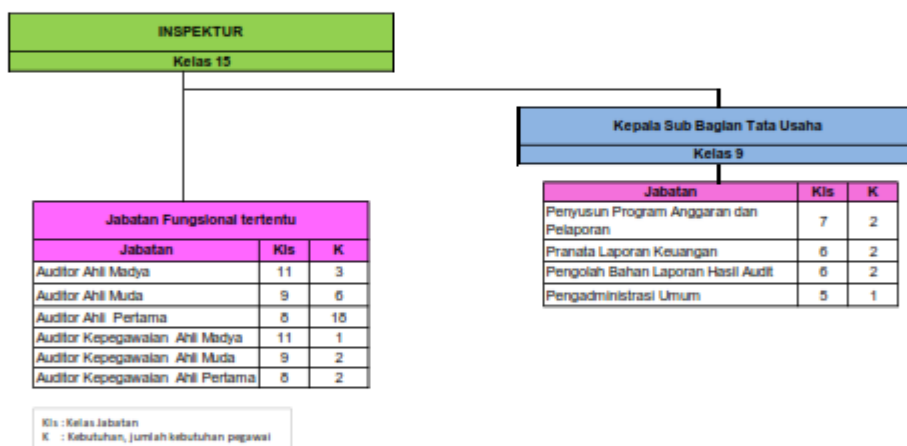
KEPALA  
 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
 INDONESIA

ttd

NUSRON WAHID

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BADAN NASIONAL  
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 01 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
 DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
 INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2017  
 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA  
 JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN  
 NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
 INDONESIA.

**PETA JABATAN INSPEKTORAT**



KEPALA  
 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
 PERLINDUNGAN TENAGA KERJA  
 INDONESIA

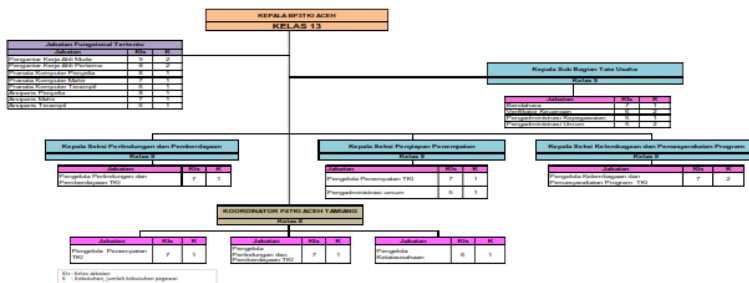
ttd

NUSRON WAHID

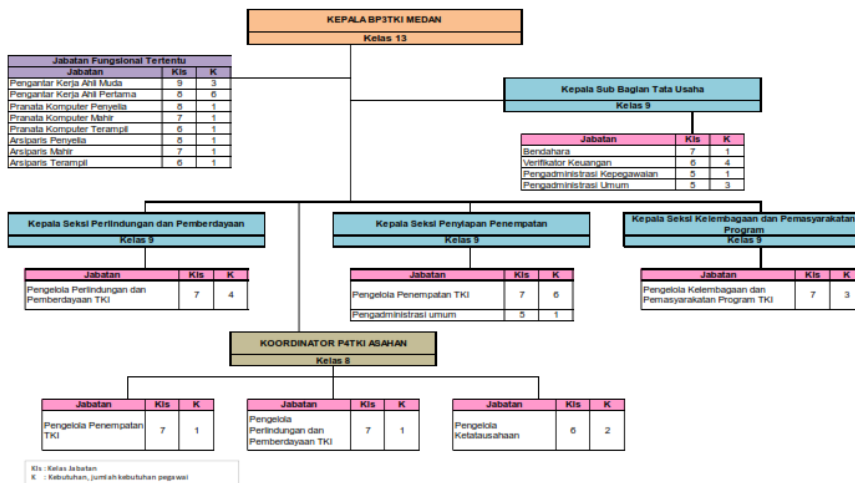
LAMPIRAN X  
 PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA  
 NOMOR 01 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR 03  
 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN DI  
 LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
 TENAGA KERJA INDONESIA.

**PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**

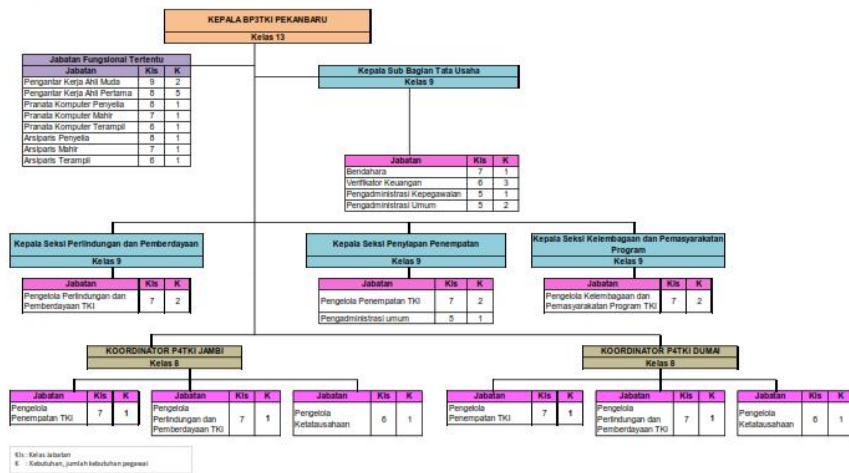
**1. PETA JABATAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BP3TKI) ACEH**



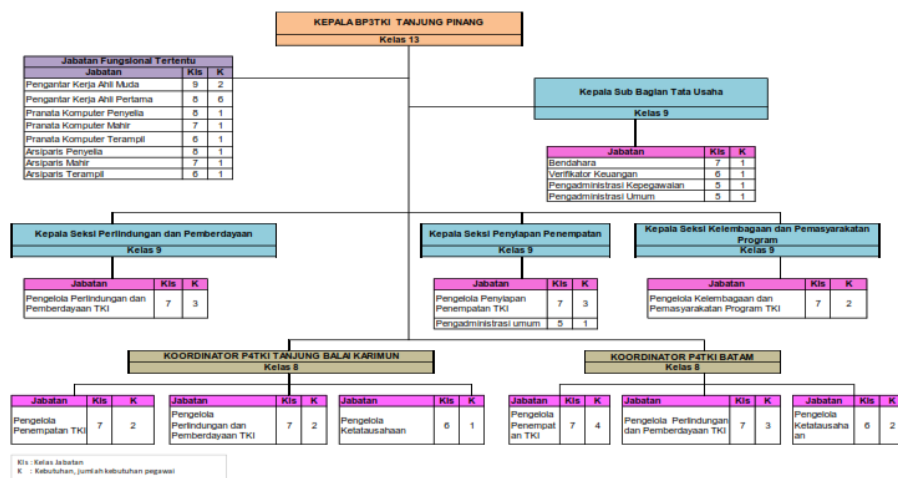
**2. PETA JABATAN BP3TKI MEDAN**



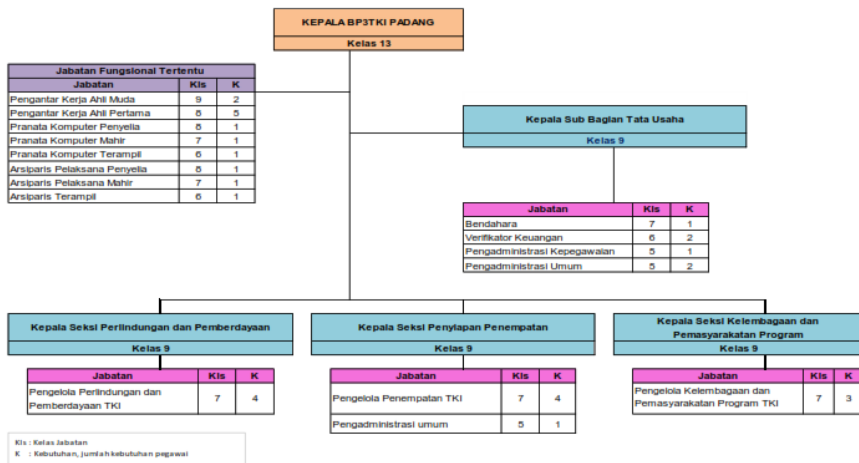
3. PETA JABATAN BP3TKI PEKANBARU



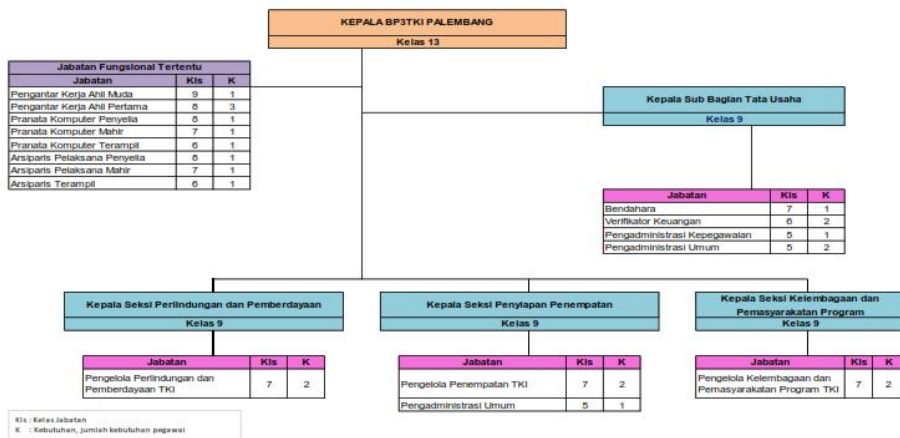
4. PETA JABATAN BP3TKI TANJUNG PINANG



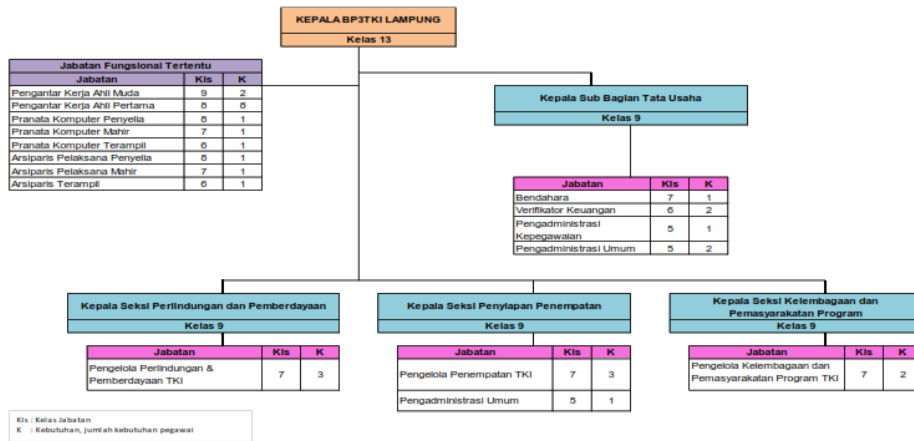
5. PETA JABATAN BP3TKI PADANG



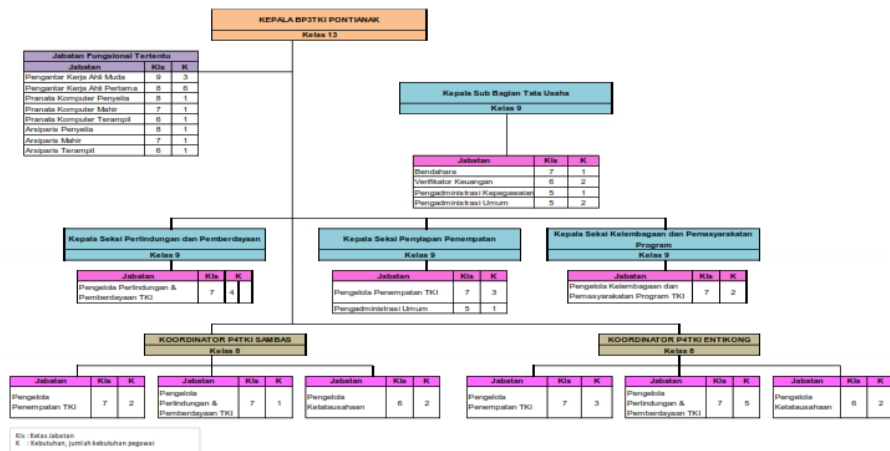
6. PETA JABATAN BP3TKI PALEMBANG



7. PETA JABATAN BP3TKI LAMPUNG

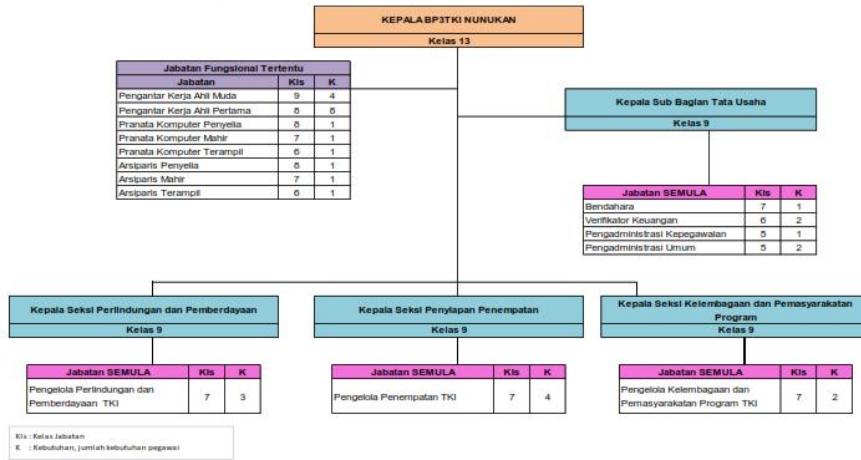


8. PETA JABATAN BP3TKI PONTIANAK

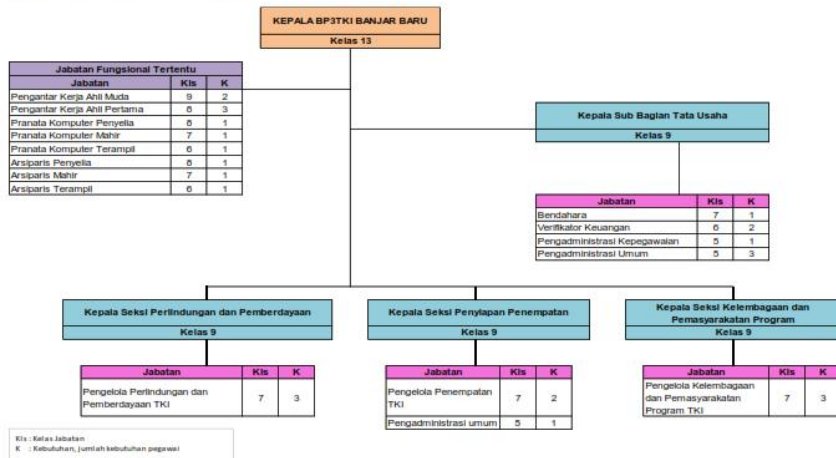




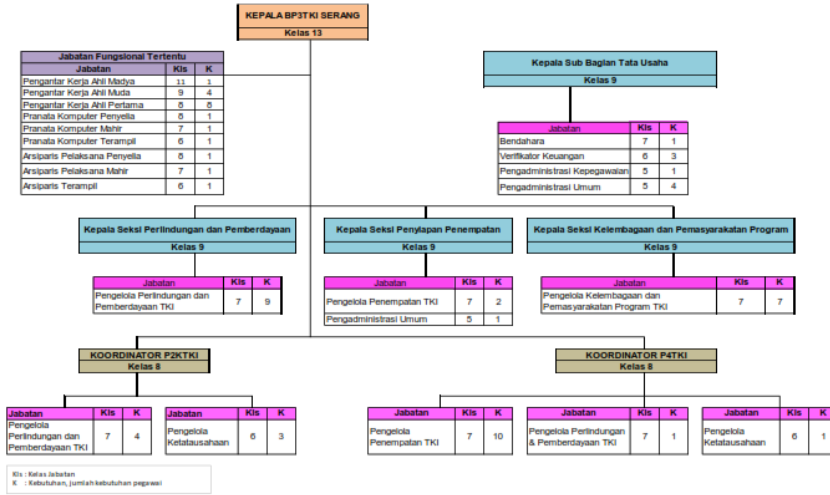
9. PETA JABATAN BP3TKI NUNUKAN



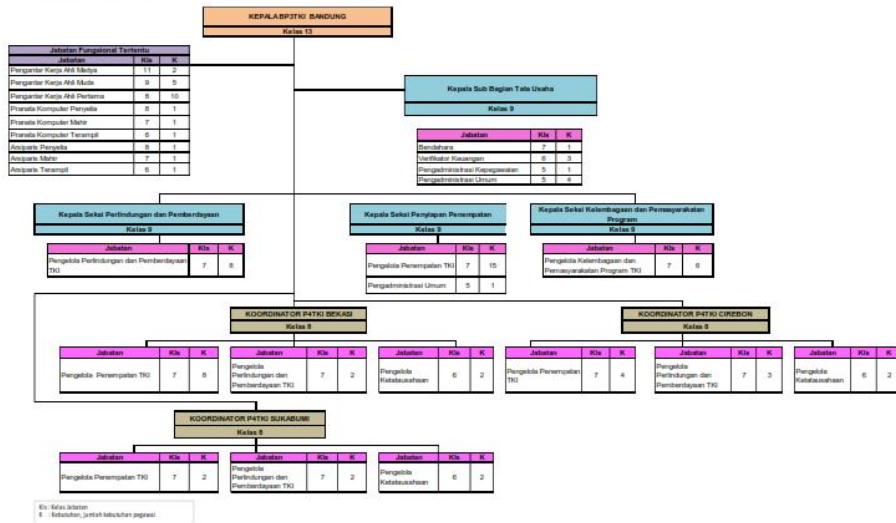
10. PETA JABATAN BP3TKI BANJAR BARU



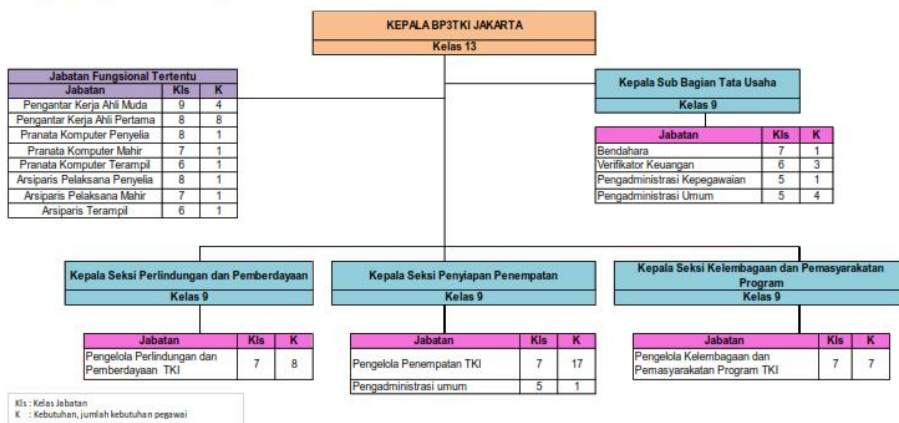
11. PETA JABATAN BP3TKI SERANG



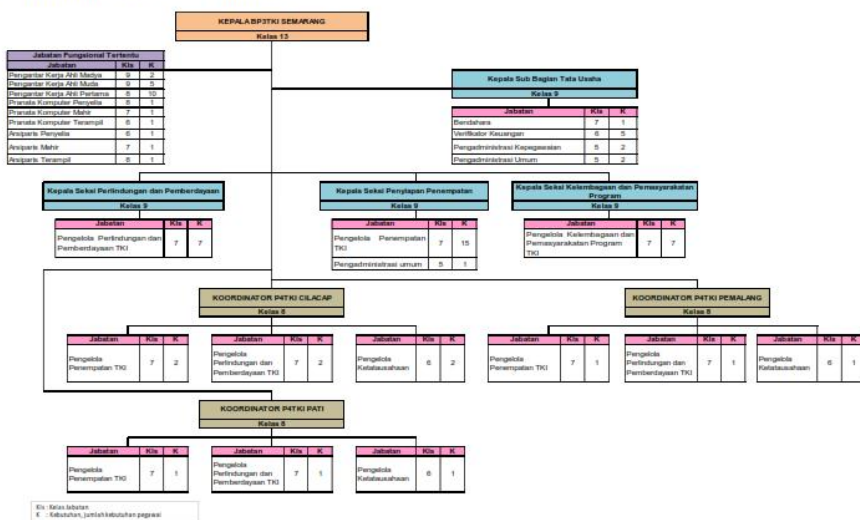
12. PETA JABATAN BP3TKI BANDUNG



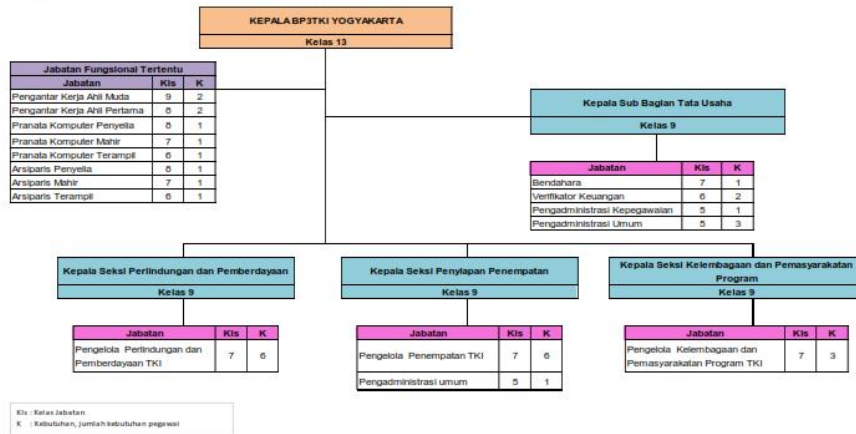
13. PETA JABATAN BP3TKI JAKARTA



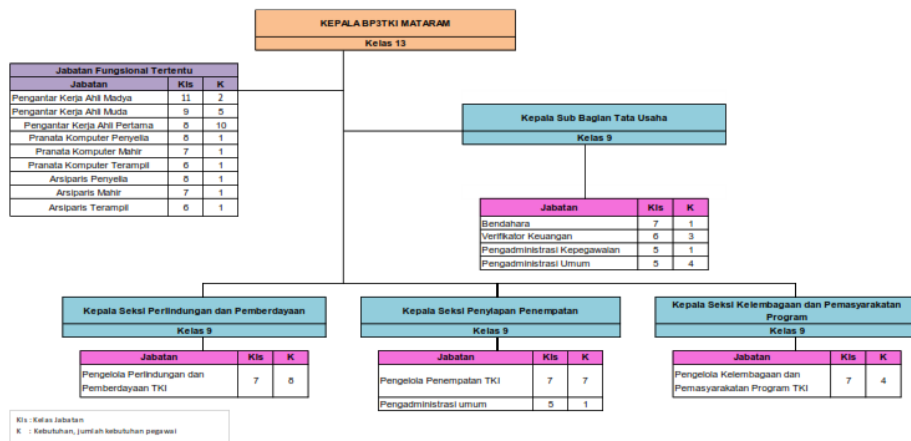
14. PETA JABATAN BP3TKI SEMARANG



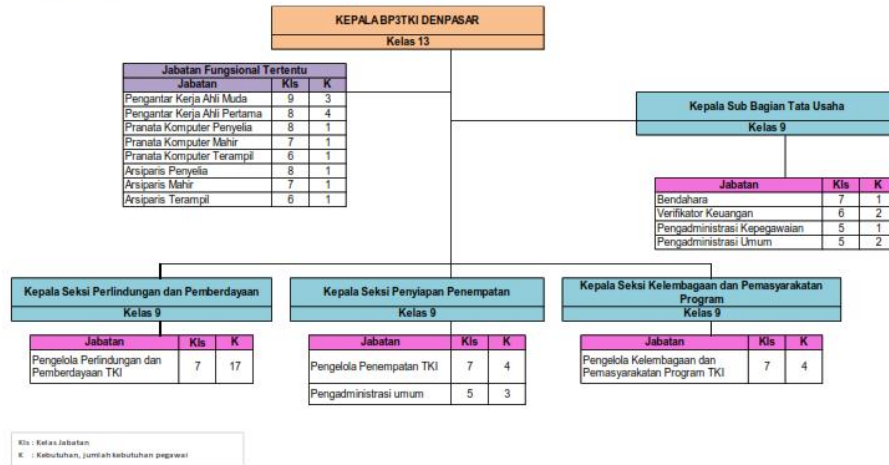
## 15. PETA JABATAN BP3TKI YOGYAKARTA



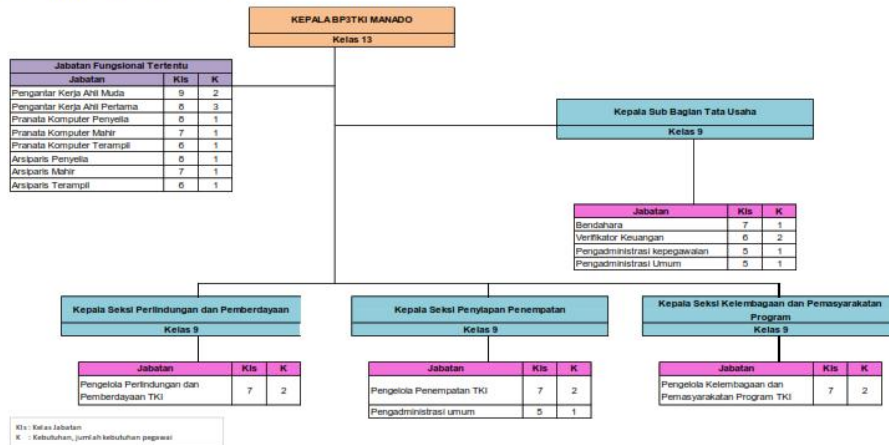
## 16. PETA JABATAN BP3TKI MATARAM



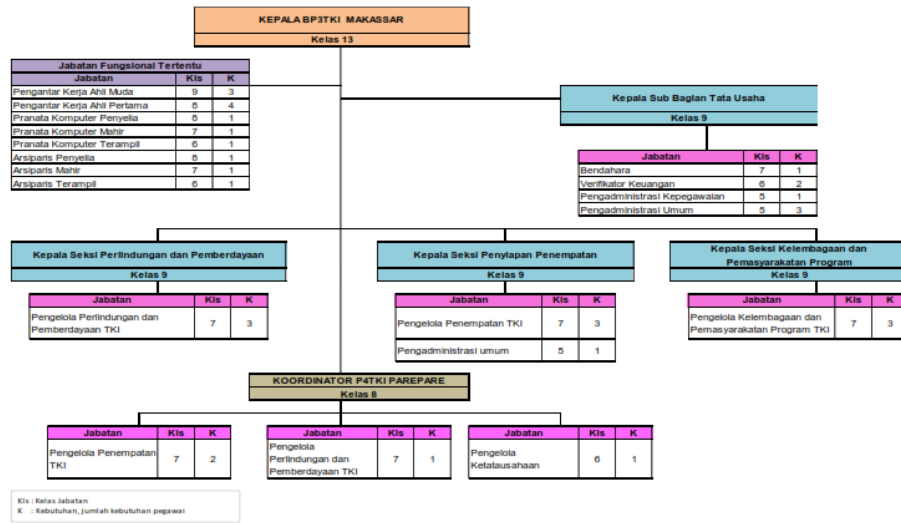
17. PETA JABATAN BP3TKI DENPASAR



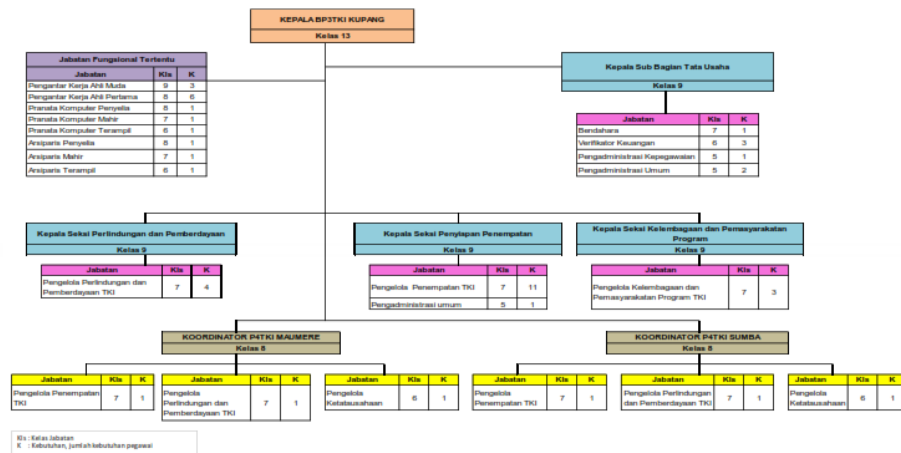
18. PETA JABATAN BP3TKI MANADO



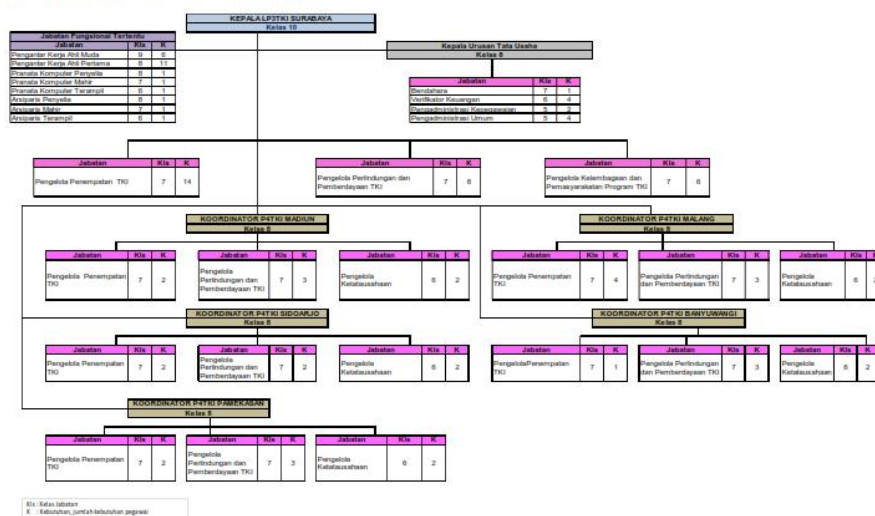
19. PETA JABATAN BP3TKI MAKASAR



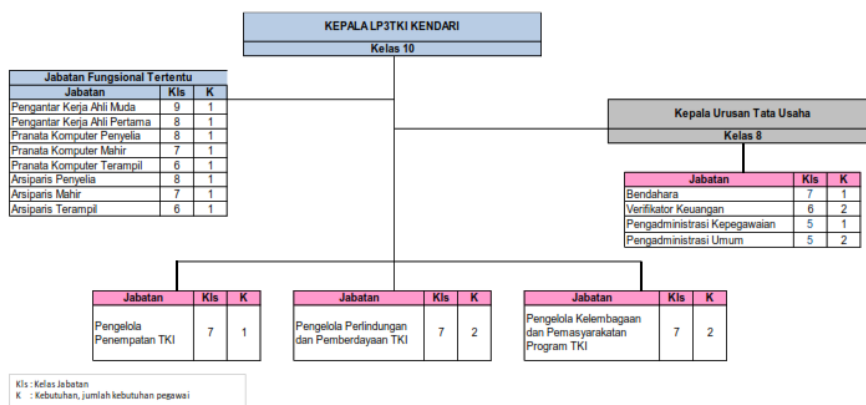
20. PETA JABATAN BP3TKI KUPANG



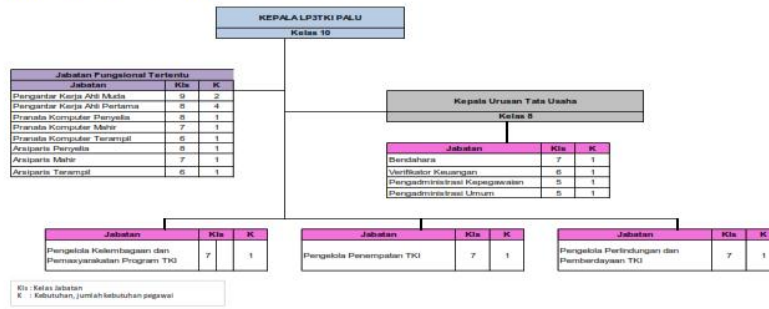
21. PETA JABATAN LP3TKI SURABAYA



22. PETA JABATAN LP3TKI KENDARI



23. PETA JABATAN LP3TKI PALU



KEPALA  
BADAN NASIONAL  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA

ttd  
NUSRON WAHID